

RENCANA KERJA

2026



DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2 0 2 5

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN TAHUN 2024	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian 2024	16
2.3. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025	23
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	25
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN	
3.1. Tujuan	27
3.2. Sasaran	27
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	28
3.4. Sub Kegiatan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	31
3.5. Indikator Kinerja Utama	
BAB IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI	
4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	33
4.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	33
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	
5.1. Urusan Rutin	35
5.2. Urusan Pilihan Pertanian	36
BAB VI. PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Evaluasi Perencanaan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024	12
Tabel 2.2. Perbandingan Target dan Realisasi NTUP Tahun 2023 dan Tahun 2024	16
Tabel 2.3. Perbandingan Capaian Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Masing2 Sub Sektor di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020-2024	17
Tabel 2.4. Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Pertanian Berbasis Outcome Tahun 2023 dan 2024	19
 Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	 27
Tabel 4.1. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026	33
Tabel 4.1. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026	33
 Tabel 5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan Sekretariat Dinas Pertanian	 35
Tabel 5.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	36
Tabel 5.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan Bidang Perkebunan	37
Tabel 5.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan Bidang Peternakan	37
Tabel 5.5. Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	38
Tabel 5.6. Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan Bidang Penyuluhan	38
Tabel 5.7. Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan UPTD Puskesmas Kota Manna	39
Tabel 5.8. Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan Puskesmas Sulau .	39
Tabel 5.9. Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan	39
Tabel 5.10. Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan Balai UPTD Balai Benih TPHP	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026;
2. Matrik Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026;
3. Cascading Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026.

1.1. Latar belakang

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 merupakan implementasi Tahun ke-4 (keempat) dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Periode Tahun 2025-2029 yang memiliki kedudukan strategis yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja harus memenuhi prinsip dasar sebagai berikut:

- 1. Participative**, yaitu rakyat harus harus turut serta dalam prosesnya. Karena secara langsung masyarakat akan menikmati keuntungan dari hasil perencanaan jika mereka ikut andil dalam prosesnya.
- 2. Sustainable**, artinya perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap akan tetapi harus berlanjut atau berkesinambungan sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan masyarakat, tidak terjadi kemunduran. Hal berarti pelaksanaannya perlu evaluasi dan pengawasan sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.
- 3. Holistic**, sesuai dengan artinya "menyeluruh", prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan pelaksanaannya tidak hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari seluruh aspek, dan dalam keutuhan sebuah konsep, yang dalam konsep tersebut juga harus

mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.

RENJA Dinas Pertanian adalah rencana program/kegiatan yang merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu pada RPJMD melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Tahapan penyusunan rencana kerja SKPD dimulai dari penyusunan awal rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdasarkan dokumen RPJMD dan Rencana Strategis SKPD, yang kemudian dituangkan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) dan selanjutnya menjadi Renja. Rancangan Renja SKPD inilah yang akan dibawa pada pelaksanaan musrenbang RKPD yang pada akhirnya RKPD akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati dan Renja SKPD menjadi Dokumen Renja SKPD.

RENJA memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

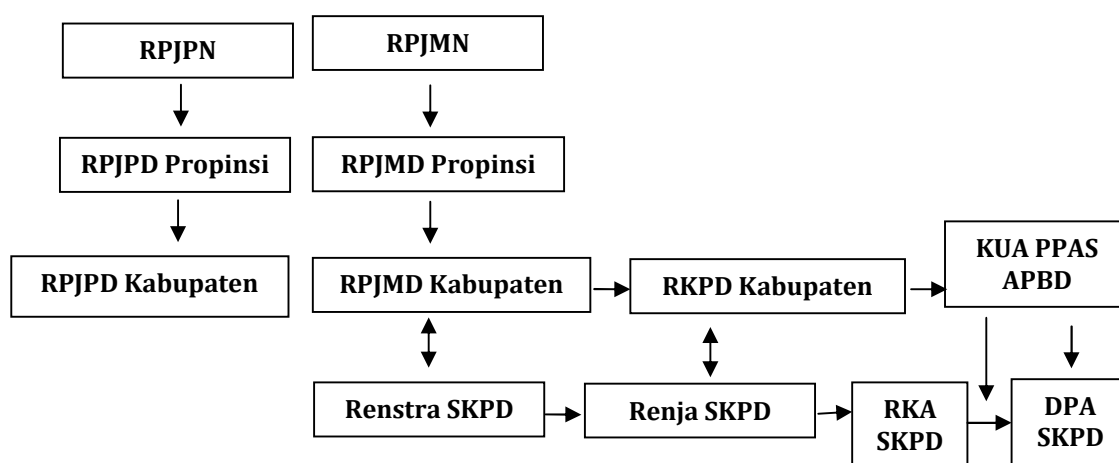
1. **Secara substansial**, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, yang wajib dilaksanakan SKPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
2. **Secara normatif**, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. **Secara operasional**, memuat arahan untuk peningkatan kinerja SKPD dibidang pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala SKPD; dan

4. **Secara faktual**, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan SKPD dalam merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan ditingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan dokumen perencanaan lain disajikan sebagaimana diagram berikut :

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Rencana Kerja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026 mengacu pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembartaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

- Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 15. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
 16. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2021, Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011, Nomor 8);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021, Nomor 03);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8;

20. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;
21. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud :

1. Penjabaran dari RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 tahun keempat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2026 yang akan dibiayai dari sumber dana APBD;
3. Menyediakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparaturnya untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2026 adalah :

1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran dan rencana kinerja/kerja Dinas Pertanian Tahun 2026;
2. Membangun partisipasi aktif para stake holder stakeholder dibidang Pertanian dalam perencanaan pembangunan Pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN ; Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RENJA, aturan perundangan yang menjadi landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya dokumen RENJA serta sistematika penulisan dokumen

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN TAHUN 2024 : Memuat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja yang diselenggarakan pada tahun N-2 (tahun 2024) yang dilengkapi dengan analisis hasil capaian dari masing-masing sektor, juga analisis pencapaian yang akan diraih pada tahun 2025 serta kajian terhadap isu-isu penting dan strategis yang akan mempengaruhi terhadap capaian kinerja organisasi.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN : Melakukan kajian dan telaah terhadap kebijakan nasional, kebijakan

propinsi serta rencana strategis dari Kementerian Pertanian pada tahun RENJA akan dilaksanakan, disamping itu dalam Bab ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian sebagaimana tertuang dalam RENSTRA 2025-2029 serta melaksanakan telaah terhadap usulan masyarakat untuk perumusan kegiatan prioritas di tahun 2026

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD: Menjelaskan Program kerja yang akan dilaksanakan dimasing-masing unit kerja lingkup Dinas Pertanian dilengkapi dengan rencana pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

BAB V. PENUTUP : legalisasi dokumen RENJA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dimaksudkan untuk melihat sejauh mana proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan SKPD serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan program pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian di tahun berikutnya.

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Beberapa hal pokok yang dilakukan dalam melakukan evaluasi RENJA adalah sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang dikehendaki;
- c. Efektifitas kebijakan dalam implementasi untuk mencapai tujuan dan sasaran;

Alokasi Anggaran pada Tahun 2024 adalah untuk pembiayaan sebanyak 5 Program, 13 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang terkait secara langsung dengan upaya pembangunan sektor pertanian serta kegiatan mendukungnya. Rincian kegiatan untuk

masing-masing sub sektor yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat sebanyak 5 Kegiatan;
2. Kegiatan Prioritas pada Bidang Teknis sebanyak 8 kegiatan.

Hasil evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program kegiatan pada Triwulan I sampai dengan IV Tahun Anggaran 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Hambatan/Kendala Internal, yang disebabkan oleh :
 - a. Pola komunikasi yang belum terjalin intensif antar bidang sehingga permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan tepat waktu harus tertunda dari jadwal yang sudah ditetapkan;
 - b. Pembiayaan rencana kegiatan masih tergantung pada kucuran anggaran dari pemerintah pusat.
2. Hambatan/Kendala Eksternal, yang disebabkan oleh :
 - a. Komitmen terhadap rencana prioritas belum didukung dengan anggaran yang memadai;
 - b. Kehilangan hasil produksi (*food losses*) karena perlakuan pengolahan hasil yang lemahnya kontrol disetiap tahapan;
 - c. Perubahan iklim global;
 - d. Pemborosan pangan yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan diversifikasi konsumsi pangan;
 - e. Tingginya harga produksi hanya pada tingkat distributor sementara ditingkat petani masih sangat rendah;
 - f. Kemampuan petani dalam mengaskes permodalan masih relative rendah.

Secara umum capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kerja program yang dilaksanakan pada tahun 2024 terhadap program/kegiatan yang bersifat rutin dan prioitas cukup baik. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.
EVALUASI PERENCANAAN KINERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2024

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan OPD s/d Tahun Lalu (2023) Tahun N-2		Target Kinerja & Anggaran Renstra OPD Tahun 2024 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun N-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024	
1	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7 x 100%)		10 = (6 + 8)		11 = (10/5 x 100%)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP														
	Kegiatan Perencanaan,															
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	75.000.000	9 dokumen	9.764.500	9 dokumen	65.000.000	9 dokumen	19.440.340	100	29,90	9 Dokumen	29.204.840	100	38.94
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan, 5 dokumen	200.000.000	6 Laporan	128.207.400	6 laporan	190.000.000	6 Laporan	85.557.684	100	45,03	6 Laporan	213.765.084	100	106.88
2	Kegiatan Administrasi Keuangan															
	Perangkat Daerah							21.567.206.000								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	24.630.645.708	183 Orang/Bulan	14.035.579.043	183 Orang/Bulan	21.119.706.000	183 Orang/Bulan	14.516.377.081	100	68,73	183 Orang/Bulan	28.551.956.124	100	115.92
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	450.000.000	12 Dokumen	529.550.000	1 Dokumen	420.000.000	12 Dokumen	672.560.000	100	160,13	12 Dokumen	1.202.110.000	100	267.14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	15.000.000	18 Laporan	7.922.000	18 Laporan	12.500.000	18 Laporan	10.926.100	100	87,40	18 Laporan	7.922.000	100	52.81
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	15.000.000	0	0	0	0		20.926.100	100	100,00
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan, 1 Dokumen (KIB)	35.000.000	2 laporan	21.685.000	2 laporan	30.000.000	2 laporan	18.870.000	100	63,00	2 laporan	21.685.000	100	61.96
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN dinas	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	-	-	1 Dokumen	8.000.000	-	0	0	0	-	0	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	-	-	10 Orang	100.000.000	-	0	0	0	-	0	0	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 jenis	100.000.000	17 Paket	235.909.660	6 Paket	100.000.000	17 Paket	303.520.214	100	303,52	17 Paket	235.909.660	100	235.91
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar, majalah, iklan	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Kali	300.000.000	40 Laporan	226.758.483	40 Laporan	300.000.000	40 Laporan	273.911.666	100	91,30	40 Laporan	226.758.483	100	75.59
6	Pengadaan Barang Milik Daerah			125.000.000										303.520.214	100	242.82
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			125.000.000										303.520.214	100	242.82
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang diadakan	-	-	-	-	5 Unit	125.000.000	0	0	0	0	-	0	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan	5 Unit	125.000.000	-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			110.000.000			100.000.000						0	0	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jaringan Telepon, Air, Listrik dan internet	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	12 Laporan	80.000.000	12 Bulan	0	0	0	-	0	0	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Orang/	20.000.000	-	12 Laporan	20.000.000	0	0	0	0	-	0	0	0	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah						75.000.000						0	0	0	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	12 Bulan	50.000.000	5 Unit	64.410,108	5 Unit	50.000.000	5 Unit	96.932.400	100	193,86	5 Unit	64.410,108	100	128,82
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	20 unit / tahun	30.000.000	20 unit / Tahun	-	20 unit	25.000.000	10 Unit	20.705.000	100	82,82	20 unit / Tahun	0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	-	-	1 Unit	-	0	0	1 Unit	80.000.000	100	100,00	-	0	0	0
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.661.400.000							0	0	0
														80.000.000	100	100
1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						286.400.000							0	0	0
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 dokumen	500.000.000	12 Laporan	620.285.600	12 Laporan	150.000.000	0	0	100	0	12 Laporan	0	0	0
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	290.165.027	12 Laporan	136.400.000	12 Laporan	428.394.100	100	314,71	12 Laporan	620.285.600	100	1240,57
2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						325.000.000							290.165,027	0	0
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah SDG Hewan/ Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	2 VUB	175.000.000	2 VUB	14.998.710	2 VUB	145.000.000	2 VUB	12.533.200	100	8,64	2 VUB	-	0	0
	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan Pelestarian dan pemurnian (UPTD Balai Benih Kota Medan)						2 VUB	30.000.000	0	0	0	0		443.392,810	0	0
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					2 Dokumen	150.000.000	0	0	0	0		-	0	0
3	Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer						20.000.000							-	0	0
	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Laporan engawasan dan Penindakan	11 Kecamatan	20.000.000	-	-	2 Kasus	20.000.000	-	-	-	-	-	-	0	0
4	Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain						1.030.000.000							0	0	0
	Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ kota lainnya	Jumlah Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	sapi unggul 20 Ekor, Kambing 25 Ekor	1.400.000.000	665 Ekor	666.878.240	100 Ekor	1.000.000.000	0	0	0	0	665 Ekor	0	0	0
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ kota lainnya	Jumlah Hijauan Pakan Ternak	5 ton	75.000.000	5 ton	-	4 ton	30.000.000	0	0	0	0	-	666,878,240	100	889,17
C	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						4.322.800.000							0	0	0
														0	0	0

5	Kegiatan Pengembangan Prasarana							842.800.000								0	0	0
	Pertanian															0	0	0
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan adangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola	Padi = 4,1	100.000.000	3 Dokumen	245.064.030	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	184.124.300	100	46,03	3 Dokumen			0	0	0
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Jumlah dokumen Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	-	-	-	-	1 Dokumen	192.800.000	0	0	0	0	-			245.064.030	100	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					5 Laporan	100.000.000	12 Laporan	1.317.605.596	100	1.317,60				0	0	0
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan						1 Dokumen	150.000.000	0	0	0	0				0	0	0
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan								2 orang	20.342.131	100,00	100,00				0	0	0
	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, sarana, kawasan pertanian								1 dokumen	94.564.000	100,00	100,00				0	0	0
6	Kegiatan Pembangunan Prasarana							3.480.000.000								0	0	0
	Pertanian															0	0	0
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	150.000.000	6 Unit	1.200.000.000	4 Unit	300.000.000	44 Unit	3.356.334.404	100	1.118,77	6 Unit			0	0	0
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, rehabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	120.000.000	5 Unit	600.000.000	4 Unit	480.000.000	0	0	0	0	5 Unit	1.384.124.300	100	1153,43		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Km	400.000.000	44 Unit	7.853.687.945	10 Unit	1.500.000.000	0	0	0	0	44 Unit	600.000.000	100	150		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	240.000.000	-	-	4 Unit	480.000.000	5 Unit	600.000.000	100	125,00	-	9.171.293.541	-	3821,37		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	100.000.000	-	-	1 Unit	100.000.000	0	0	0	0	-	0	0	0		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	120.000.000	-	-	1 Unit	120.000.000	0	0	0	0	-	0	0	0		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP	10 Unit	100.000.000	2 Unit	-	10 Unit	300.000.000	1 Unit	124.910.000	100	41,63	2 Unit	0	0	0		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Luas Lahan Rawa yang	100 Ha/Tahun	25.000.000	100 Ha/Tahun	-	4 Unit	200.000.000	1 Unit	2.627.725.000	100	1.313,86	100 Ha/Tahun	0	0	0		
7	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit															0	0	0
	Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota															3.356.334.404	100	100,00
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	1. Jumlah Sumber Bibit ternak	5 Kecamatan	100.000.000	-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0		
8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							404.000.000								0	0	0
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota							150.000.000								124.910.000	100	100,00
																2.627.725.000	100	100,00
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Fasilitas Unit layanan	11 Kecamatan	200.000.000	11 Kecamatan	-	12 Laporan	150.000.000	0	0	0	0	-	0	0	0		
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	12 Laporan	286.266.300	100,00	100,00	-	0	0	0			
9	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota							20.000.000								0	0	0
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Dokumen/Tahun	20.000.000	-	-	12 Laporan	20.000.000	0	0	0	0	-	0	0	0		
10	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota							100.000.000								0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0

	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPTD Puskesmas Kota Manna)	11 Kecamatan	150.000.000	24 Laporan	203.173.580	12 Laporan	50.000.000	24 Laporan	74.610.550	100	149,22	24 Laporan	0	0	0
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPTD Puskesmas Sulau Kedurang Ilir)					12 Laporan	50.000.000	24 Laporan	74.610.550		149,22		489,439,880	100	100,00
11	Penerapan dan Pengawasan							134.000.000						0	0	0
	Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner													0	0	0
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah laporan Usaha Hewan dan Produk Hewan	4 laporan	115.000.000	4 laporan	-	12 laporan	80.000.000	0	0	0	0	-	0	0	0
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (UPTD Rumah Polong Hewan)					12 Laporan	54.000.000	12 Laporan	18.902.271	100	35,00		0	0	0
E	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA							555.500.000						0	0	0
	PERTANIAN													0	0	0
12	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian							555.500.000						74.610.550	100	100
	Kabupaten/ Kota													0	0	0
														74.610.550	100	100
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Laporan	4 Laporan	519.000.000	4 laporan	-	200 Ha	330.500.000	0	0	0	0	-	0	0	0
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Laporan	4 Laporan	125.000.000	4 Laporan	-	100 Ha	125.000.000	0	0	0	0	11 kali	0	0	0
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Laporan	4 Laporan	100.000.000	-	-	12 Laporan	100.000.000	0	0	0	0	-	0	0	0
F	PROGRAM PERIZINAN USAHA							151.500.000						0	0	0
	PERTANIAN													0	0	0
13	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha													18.902.271	100	100
	Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							151.500.000						0	0	0
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	20.000.000	-	-	3 Dokumen	20.000.000	0	0	0	0	-	0	0	0
	Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah Kelompok	55 Kelompok	30.000.000	-	-	1 Dokumen	30.000.000	0	0	0	0	-	0	0	0
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian													0	0	0
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Laporan	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	-	12 Laporan	101.500.000	0	0	0	0	-	0	0	0
G	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							648.672.000						0	0	0
14	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							648.672.000						0	0	0
														0	0	0
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	10 unit	350.000.000	10 unit	-	10 unit	200.000.000	10 unit	74.640.000	100	37,32	-	0	0	0
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	200 Kelompok Tani	140.000.000	240 Kelompok Tani	-	720 Unit	110.000.000	0	0	-	-	-	0	0	0
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	PENAS	500.000.000	10 Unit	353.482.852	10 Unit	253.672.000	10 Unit	89.293.100	100	32,44	10 Unit	0	0	0
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani	44 pengembangan KEP 11	50.000.000	-	-	22 Unit	35.000.000	0	0	0	0	-	0	0	0
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kab/Kota	Jumlah Sekolah Lapang yang Terbentuk dan Beroperasi					8 Unit	50.000.000	0	0	0	0		0	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam IKU adalah sebagai berikut :

A. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

Terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada NTUP tahun 2024 dari masing-masing sub sektor, meskipun data menunjukkan angka yang bervariasi dan surplus diatas 100. Pada tahun 2024, NTUP menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan NTUP pada tahun sebelumnya.

Pengaruh terbesar dari peningkatan nilai NTUP tersebut adalah membaiknya harga pasar dan peningkatan produksi dari komoditas pertanian. Bahkan nilai jual komoditas pangan khususnya komoditas perkebunan dan padi yang harganya relative tinggi dan stabil.

Secara rinci Perbandingan Target dan Realisasi NTUP pada tahun 2023 dan 2024 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.
Perbandingan Target dan Realisasi NTUP
Tahun 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sub Sektor	Nilai Tukar Petani (NTUP)			
				2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) NTUP = (IT/IB) x 100 %	1. Tan. Pangan	107,00	100,45	106,00	105,75
			2. Hortikultura	105,00	105,15	105,00	105,00
			3.Perkebunan	107,00	115,70	110,00	125,50
			4.Peternakan	105,00	110,30	106,00	110,20
Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)				106,00	107,90	106,75	111,61

Sumber : BPS dan Kementerian Pertanian setelah dilakukan pengolahan Dinas Pertanian Kab. BS

Dari tabel diatas terlihat bahwa Realisasi NTUP pada tahun 2024 berada pada nilai **111,61 (surplus 11,61)** dan lebih **4,86** diatas target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Realisasi NTUP pada tahun 2023 maka realisasi NTUP pada tahun 2024

mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar **3,71**, dimana pada tahun 2023 NTUP hanya berada pada angka **107,90**. Capaian NTUP masing-masing sub sektor selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2020 s/d 2024 sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Perbandingan Capaian Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Masing-masing Sub Sektor di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Realisasi NTUP Per Subsektor Komoditas				Rata2 NTUP
		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	
1	2024	105,75	105,00	125,50	110,20	111,61
2	2023	100,45	105,15	115,70	110,30	107,90
3	2022	104,95	102,60	110,80	103,75	105,53
4	2021	104,52	100,80	110,75	100,30	104,29
5	2020	103,02	100,03	104,80	98,11	101,49

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata NTUP pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan angka yang selalu surplus diatas 100 *Break Event Point* (BEP). NTUP 2024 merupakan angka tertinggi capaian NTUP selama periode 5 tahun sebelumnya.

Realisasi NTUP 2024 adalah sebesar **111,61** yang berarti melebihi dari target yang ditetapkan dalam IKU dengan selisih **4,86**, dimana target NTUP pada tahun 2024 adalah sebesar **106,75**. Jika dibandingkan dengan angka NTUP pada tahun 2023 sebesar **107,95** maka angka tersebut meningkat cukup signifikan sebesar **3,66**. Namun kenaikan NTUP tersebut hingga saat ini masih belum dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah tercapai

Beberapa faktor-faktor yang masih mempengaruhi peningkatan NTUP tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Harga komoditas perkebunan terutama kelapa sawit pada awal tahun yang relative stabil yang selaras dengan peningkatan hasil produksi khususnya kelapa sawit, karet dan kopi;
- b. Ketersediaan air disentra pangan menyebabkan lahan sawah banyak dimanfaatkan untuk penanaman jagung. Peralihan

penanaman komoditas ini khususnya sektor pangan sedikit memberikan dampak peningkatan pendapatan bagi petani karena komoditas jagung memiliki kecenderungan harga pasar yang cukup stabil sehingga banyak lahan sawah beralih dari penanaman padi menjadi penanaman jagung;

- c. Peternakan secara intensif dikalangan masyarakat semakin hari semakin tumbuh dan berkembang dan memberikan efek yang menguntungkan bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- d. Peran BRIGADE ALSINTAN dalam memfasilitasi petani dalam mempercepat proses pengolahan lahan pada wilayah-wilayah sentra produksi sehingga biaya produksi pengolahan lahan sampai dengan panen lebih ringan;
- e. Aktivitas penanggulangan serangan hama dan penyakit oleh BRIGADE PROTEKSI TANAMAN Dinas Pertanian dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada petani memberikan pengaruh positif terhadap dampak kehilangan hasil dari usaha pertanian yang dilakukan petani;

Jika dibandingkan dengan capaian NTUP pada level Nasional sebesar **123,27** sebagaimana dirilis oleh Kementerian Pertanian RI pada periode November 2024 maka perolehan NTUP sebesar **111,61** tersebut masih sangat rendah. Hal ini tetap menjadi agenda Pemerintah Daerah untuk terus memberikan motivasi kepada masyarakat dalam perbaikan pola budidaya yang selama ini dilakukan.

B. Produksi Sub Sektor Komoditas

Secara rinci capaian kinerja peningkatan produksi pertanian berbasis outcome pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian produksi pada tahun 2023 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan
Produksi Pertanian Berbasis Outcome Tahun 2023 dan 2024

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD (Sesuai RPJMD)*	Produksi 2023 (dalam ton)			Produksi 2024 (dalam ton)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tan. Pangan/ Hortikultura						
	- Padi	64.015,20	46.065,00	71,96	64.015,20	48.746,00	76,14
	- Jagung	34.200,00	6.752,00	19,74	34.800,70	16.565,00	47,60
	- Sayuran	6.500,00	4.086,64	62,87	6.300,10	4.852,35	77,02
2	Perkebunan						
	- Kelapa Sawit	365.000,00	314.243,08	86,09	375.175,00	397.90,83	106,91
	- Karet	550,00	512,70	93,22	520,00	620,40	119,31
	- Kopi	950,00	877,51	92,37	950,00	1.057,40	111,31
	- Kelapa	975,00	947,81	97,21	975,00	654,19	87,10
3	Peternakan						
	- Sapi	198,38	151,71	76,47	201,35	126,56	62,86
	- Kerbau	16,41	11,66	71,05	16,54	14,87	89,90
	- Kambing	3,20	3,00	93,75	4,20	3,79	90,24
	- Unggas	165,55	179,60	108,49	215,42	217,79	101,10

Berikut ini adalah evaluasi dan analisis yang dilakukan atas capaian yang diperoleh dari produksi dari masing-masing komoditas sebagai berikut :

1. Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pada tahun 2024, rata-rata produksi komoditas Tanaman Pangan dan hortikultura menunjukkan angka yang jauh dari target yang ditetapkan, jika memperhatikan **Tabel 2.4** dapat disimpulkan bahwa hasil produksi padi setelah dihitung dengan kebutuhan/konsumsi rata-rata perkapita/ tahun terhadap komoditas ini, angka tersebut masih terbilang Surplus meskipun sangat rendah, jika dibandingkan dengan kebutuhan rata2 perkapita/tahun penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar **114,80 kg/kapita/tahun** kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk Bengkulu Selatan yang berjumlah **170.093 Jiwa**, maka konsumsi terhadap beras adalah sebesar **19.527 ton**. Dengan produksi sebesar **48.746 ton**, jika dikonversikan menjadi beras maka diperoleh angka **27.726 ton** kemudian dikurangi jumlah kebutuhan konsumsi penduduk selama 1 tahun maka angka Surplusnya adalah sebesar **8.199 ton**. Angka ini sedikit

mengalami penurunan dibanding perolehan surplus produksi pada tahun 2023 sebesar **8.483 ton** atau berkurang sebesar **284 ton (3,35%)**.

Untuk komoditas jagung pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 245,33% dimana pada tahun 2024 produksi jagung di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar **16.565 ton** sedangkan pada tahun 2023 hanya sebesar **6.752 ton**. Namun jika dibandingkan dengan target produksi pada tahun 2024 sebesar **34.800 ton** maka pencapaian pada tahun ini hanya sebesar **47,60%** saja yang berarti masih sangat jauh dari target yang diharapkan.

Tidak tercapainya target produksi yang sangat signifikan pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Semakin berkurangnya luas baku sawah dari tahun ketahun akibat peralihan fungsi lahan khususnya sawah ke komoditi lain khususnya tanaman kelapa sawit dan areal pemukiman penduduk.
- Ketersediaan air sawah untuk lahan yang menjadi pendukung terjadinya peningkatan produksi yang sangat kurang sebagai akibat dari rendahnya kemampuan tanah dalam menahan serapan air akibat dari semakin berkurangnya wilayah-wilayah tangkapan air seperti hutan karena penanaman komoditi secara monokultur.

2. Komoditas Perkebunan

Memperhatikan **Tabel 2.4** pencapaian produksi komoditas besar perkebunan seperti sawit Karet, Kopi menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkan rata-rata melampaui dari target yang ditentukan.

Data statistik pertanian tahun 2024 menunjukkan bahwa produksi tanaman perkebunan mencapai angka diatas 100% dari target produksi, seperti kelapa sawit yang mencatatkan angka produksi sebesar **106,06%** Karet **119,31%** dan Kopi **111,31%**. Hanya Kelapa yang tidak memenuhi target dengan pencapaian produksi hanya diangka **67,10%**.

Peningkatan produksi perkebunan yang ditunjang dengan harga pasar yang relatif stabil ini mampu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan petani dan ini memberikan pengaruh terhadap kenaikan NTUP pada tahun 2024 karena NTUP di sektor perkebunan ini mampu memberikan angka **NTUP 125 atau 25%** dari nilai BEP (*Break Event Point*)

3. Komoditas Peternakan

Pada tahun 2024, produksi komoditas peternakan mengalami penurunan yang sangat signifikan khususnya untuk komoditas peternakan ruminansia besar (Sapi dan Kerbau). sebagaimana terlihat pada **Tabel 2.4**.

Penurunan produksi ini disebabkan oleh pengaruh pandemi PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang menyerang pada ternak Sapi yang terjadi pada tahun sebelumnya. Kemudian masuk pada kuartal ketiga tahun 2024, terjadinya wabah Ngorok/SE yang menyebabkan ribuan ternak kerbau dan sapi yang mengalami kematian.

Namun produksi komoditi unggas relative stabil bahkan cenderung mengalami peningkatan mencapai 101,10% melebihi target yang ditetapkan, dan sedikit lebih tinggi disbanding angka produksi tahun 2023. Komoditas peternakan yang paling banyak memberikan pengaruh peningkatan terbesar adalah jenis Ayam Pedaging. Meskipun tingkat konsumsi daging komoditas ini belum berpengaruh secara

signifikan karena hasil produksi dari komoditi ini sebagian dijual ke luar daerah

C. Kelembagaan dan SDM Penyuluhan

Capaian target outcome IKU kelembagaan dan SDM penyuluhan pada tahun 2024 relatif masih sama dengan capaian pada tahun sebelumnya dan cenderung tidak mengalami peningkatan. Kenaikan kelas BPP dari Tingkat Pratama menjadi Madya yang ditargetkat sebanyak 6 BPP belum tercapai.

Selain itu pembentukan kelompok tani sawah berbasis hamparan masih tetap menjadi pekerjaan rumah dari Bidang penyuluhan yang belum dapat terselesaikan hingga akhir tahun 2024. Realisasi pembentukan kelompok tani sawah berbasis hamparan yang sudah terlaksana hingga saat ini hanya berkisar diangka 30% dari total keseluruhan lahan sawah di Kabupaten yang berjumlah 7.807 ha.

Hal ini perlu dilakukan secara serius dan pro aktif oleh para penyuluh yang berada di wilayah kerja masing-masing agar kedepan lebih memprioritaskan dalam pembentukan kelompok-kelompok berbasis hamparan khususnya lahan sawah untuk memudahkan petugas dalam pembinaan dan pengawasan serta pengambilan data lahan dan petani dalam rekomendasi pemberian bantuan pemerintah serta menjaga kekompakan petani yang tergabung dalam kelompok ketika mengatasi permasalahan dalam di hamparan.

D. Sarana dan Prasarana Pertanian

Dukungan program kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian RI masih terus dirasakan oleh daerah meskipun sifatnya bukan dari anggaran DAK Penugasan tetapi dari DAK Aspirasi DPR-RI. Hal ini

sangat memberikan dampak positif bagi kelangsungan usaha pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Pembangunan sumber-sumber pengairan dan akses jalan pada beberapa titik di wilayah kecamatan serta pembangunan Bank pakan ternak menjadi salah satu upaya konkrit yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Disamping itu, kegiatan yang dibiayai dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Anggaran Pokok Pikiran (POKIR) Aspirasi DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pembangunan dan peningkatan ruas-ruas jalan sentra produksi dan jalan usaha tani juga telah meringankan beban masyarakat petani terhadap kebutuhan akan kelancaran akses ke sentra-sentra produksi pertanian.

2.3. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025

Pagu anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 19.127.918.420,-** dengan pagu yang dikelola oleh Sekretariat **Rp. 16.612.754.829,-** termasuk belanja untuk Gaji Pegawai sementara Bidang Teknis sebesar **Rp. 2.458.353.900,-** sedangkan untuk UPTD sebesar **Rp. 56.809.691,-** untuk membiayai 6 program, 15 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.

Dari keseluruhan anggaran yang tersedia, sampai dengan triwulan II tahun 2025 dana yang sudah terealisasi baru mencapai 44,77% yakni sebesar Rp. 8.745.506.032,- dimana Rp. 7.910.831.074,- adalah berasal dari Gaji PNS di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan. Masih rendahnya realisasi anggaran pada tahun ini disebabkan karena adanya kebijakan recofusing /pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang mencapai angka 50% dari Pagu anggaran kegiatan pembangunan yang

tersedia, sehingga menyebabkan kegiatan fisik yang seyogyanya dapat dilaksanakan menjadi ditiadakan karena anggarannya dipangkas.

Dua triwulan kedepan yakni pada semester II tahun 2025 kegiatan yang dilaksanakan hanya bersifat kegiatan rutin dan operasional kedinasan lainnya.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan yang dihadapi Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pembangunan pertanian dari tahun ke tahun selama periode RENSTRA yang lalu masih belum teratasi secara signifikan, permasalahan ini sangat mempengaruhi kualitas kinerja dan pelayanan Dinas Pertanian sampai saat ini. Hasil Identifikasi yang dilakukan masih ditemukannya permasalahan yang sama dalam rangka pembangunan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan, dan hal ini perlu secara serius ditangani oleh Pemerintah Daerah. Beberapa permasalahan dan isu strategis hasil identifikasi terhadap pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

a. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Permasalahan		Isu Strategis	
1	Regulasi pengembangan kawasan pertanian berbasis komoditas sesuai tata ruang wilayah dan Rencana Aksi pengembangan kawasan belum ditaati;	1	Ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi bahan makanan pokok beras sementara ketersediaan lahan semakin berkurang;
2	Fluktuasi harga komoditas pertanian yang cenderung tidak stabil;	2	Banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara optimal;
3	Rendahnya kualitas SDM kelompok tani dan kelembagaannya	3	Menurunnya minat dan kesadaran generasi muda untuk terjun di bidang pertanian.
4	Lemahnya posisi tawar petani atas hasil produksi sebagai akibat panjangnya rantai distribusi serta belum adanya kepastian/jaminan pemasaran produk pertanian yang dihasilkan oleh petani;		

5	Penguasaan lahan petani yang semakin sempit, bahkan di beberapa wilayah petani hanya sebagai penggarap hal ini berakibat pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan;		
6	Keterbatasan akses permodalan dan lemahnya penguasaan teknologi di tingkat petani karena rendahnya tingkat pendidikan sehingga sulitnya petani mengadopsi teknologi yang berdampak pada penerapan budidaya yang belum sesuai rekomendasi		
7	Perubahan iklim global mengakibatkan laju serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) masih belum terkendali secara optimal;		
8	Persepsi dan kesadaran petani dalam penggunaan bibit unggul masih rendah.		

b. Sub Sektor Perkebunan

Permasalahan		Isu Strategis	
1	Budidaya perkebunan dengan pola monokultur menyebabkan degradasi lahan;	1	Hilirisasi produk perkebunan;
2	Perubahan iklim global menyebabkan fluktuasi hasil panen dan meningkatkan risiko gagal panen;	2	Deforestasi lahan;
3	Ketergantungan terhadap penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan dapat menurunkan kualitas tanah dan berdampak pada hasil panen;	3	Pembangunan perkebunan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memenuhi standar pasar global;
4	Lahan Perkebunan mengalihfungsikan lahan sawah;	4	Sektor perkebunan sering menjadi penopang ekonomi pada saat krisis.
5	Lahan Perkebunan merambah hutan kawasan		

c. Sub Sektor Peternakan

Permasalahan		Isu Strategis	
1	Kesadaran peternak masih kurang terhadap potensi penyebaran penyakit ternak;	1	Ancaman wabah penyakit ternak;
2	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan	2	Isu stunting yang disebabkan karena kurangnya asupan protein hewani;
3	Pola pemeliharaan ternak secara intensif belum menjadi kebiasaan;		
4	Minimnya SDM Peternakan yang berkompeten;		
5	Rendahnya kemampuan peternak dalam penyediaan bahan pakan yang cukup dan berkualitas ;		
6	Minimnya Pengetahuan dan Kesadaran pelaku usaha dalam penerapan Higienitas dan sanitasi pengolahan produk hasil peternakan;		
7	Terbatasnya Petugas Kesmavet yang bersertifikat kompetensi;		
8	Pelaku usaha peternakan terkendala pada ketersediaan bahan baku produksi dan permodalan		

d. Sub Sektor Sarana dan Prasarana Pertanian

Permasalahan		Isu Strategis	
1	Dokumen perencanaan pengembangan prasarana pertanian belum tersedia;	1	Kurangnya akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan dan informasi;

2	Ketersediaan alat dan mesin pertanian yang telah masuk pada umur tidak produktif;	2	Alih fungsi lahan sawah secara tidak terkendali;
3	Distribusi pupuk subsidi masih belum memenuhi kaidah 3T (Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Sasaran);	3	Keterbatasan irigasi dan jalan usaha tani dapat menghambat pemanfaatan lahan secara optimal
4	Minat petani dalam memanfaatkan program AUP dan AUTS sangat rendah		

e. Sub Sektor Penyuluhan

Permasalahan		Isu Strategis	
1	Ketersediaan tenaga Penyuluh Pertanian yang masih kurang;	1	Penarikan tenaga penyuluh pertanian dari status pegawai daerah menjadi pegawai kementerian pertanian;
2	Lemahnya Kompetensi dan kapasitas penyuluh;	2	Isu lingkungan dan ketahanan pangan yang memerlukan adaptasi teknologi dan inovasi pertanian berkelanjutan;
3	Keterbatasan kelembagaan penyuluhan dalam hal pemahaman terhadap regulasi, ketersediaan anggaran dan dukungan sarana prasarana;	3	Rendahnya kompetensi penyuluh, terutama dalam literasi digital dan penggunaan teknologi
4	Akses informasi dan teknologi masih terbatas		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, dimana dalam RENSTRA ini target waktunya adalah 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan berdasarkan pada kajian terhadap isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas Pertanian sebagai perwujudan Misi dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya Produktifitas dan Nilai Tambah Ekonomi Untuk Daya Saing Daerah”**.

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam melakukan penilaian dan pemantauan kinerja yang menjadi alat pemicu bagi organisasi untuk mencapai tujuan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut **“Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Petani”** dengan goal yang dihasilkan adalah **Meningkatnya Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)**.

Secara rinci Target Kinerja dari tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode RENTRA Tahun 2025-2029 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Daya Saing Daerah Sektor Pertanian	Meningkatnya Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	112,50	113,75	112,50	113,75	112,50	113,75

C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Secara umum program dan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, yang meliputi :
 - 1.1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
 - 1.1.1. *Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;*
 - 1.1.2. *Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;*
 - 1.1.3. *Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;*
 - 1.1.4. *Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan.*
 - 1.2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 1.2.1. *Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman;*
 - 1.2.2. *Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman.*
 - 1.3. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.
 - 1.3.1. *Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain;*
 - 1.3.2. *Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.*
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Pertanian, yang meliputi :
 - 1.1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - 1.1.1. *Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*
 - 1.1.2. *Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota;*
 - 1.1.3. *Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian.*
 - 1.2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 2.2.1. *Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian;*
 - 2.2.2. *Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;*
 - 2.2.3. *Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;*

- 2.2.4. *Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya;*
- 2.2.5. *Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;*
- 2.2.6. *Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;*
- 2.2.7. *Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas;*
- 2.2.8. *Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan.*
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang meliputi :
 - 3.1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3.1.1. *Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;*
 - 3.2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3.2.1. *Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.*
 - 3.3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - 3.3.1. *Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan;*
 - 3.3.2. *Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan;*
 - 3.3.3. *Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan;*
 - 3.3.4. *Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan*
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang meliputi :
 - 4.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota;
 - 4.1.1. *Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;*
 - 4.1.2. *Penanganan Dampak Perubahan Iklim(DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;*
 - 4.1.3. *Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.*
5. Program Perizinan Usaha Pertanian, yang meliputi :
 - 5.1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1.1.1. *Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian;*
 - 1.1.2. *Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian*

1. Program Penyuluhan Pertanian, yang meliputi :
 - 6.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - 6.1.1. *Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;*
 - 6.1.2. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;*
 - 6.1.3. *Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*
 - 6.1.4. *Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota;*
 - 6.1.5. *Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian;*
 - 6.1.6. *Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani;*
 - 6.1.7. *Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian*
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 7.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 7.1.1. *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ;*
 - 7.1.2. *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;*
 - 7.1.3. *Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah;*
 - 7.1.4. *Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah;*
 - 7.1.5. *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan.*
 - 7.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 7.2.1. *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;*
 - 7.2.2. *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;*
 - 7.2.3. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;*
 - 7.2.4. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.*
 - 7.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - 7.3.1. *Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;*
 - 7.3.2. *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.*
 - 7.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 7.4.1. *Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;*
 - 7.4.2. *Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;*
 - 7.4.3. *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.*

- 7.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 7.5.1. *Penyediaan Bahan Logistik Kantor;*
 - 7.5.2. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;*
 - 7.5.3. *Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.*
- 7.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 7.6.1. *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;*
 - 7.6.2. *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*
 - 7.6.3. *Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;*
 - 7.6.4. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*
- 7.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 7.7.1. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;*
 - 7.7.2. *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.*
- 7.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 7.8.1. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;*
 - 7.8.2. *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*
 - 7.8.3. *Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;*
 - 7.8.4. *Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*

Secara rinci matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta rencana pendanaan berdasarkan target capaian output kinerja dalam periode RENSTRA 2025-2029 sebagaimana tertera pada lampiran dokumen ini.

D. Sub Kegiatan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Disamping upaya pencapaian target kinerja organisasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, maka dari Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan diatas, terdapat sub-sub kegiatan yang turut mendukung upaya pencapaian target RPJMD dimaksud sebagai berikut :

1. *Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;*

2. *Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman;*
3. *Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;*
4. *Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;*
5. *Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan;*
6. *Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.*

BAB IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026 mengacu pada Target capaian yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2026

NO	INDIKATOR	TARGET IKU TAHUN 2026
A	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	113,29
1	Tanaman Pangan	107,65
2	Hortikultura	106,50
3	Perkebunan	127,00
4	Peternakan	112,00

B. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK berfungsi sebagai penopang IKU yang menjadi target utama, penetapan IKK dilakukan untuk mengukur bagaimana setiap aktivitas atau program berkontribusi pada pencapaian IKU tersebut. Dengan kata lain, IKK adalah metrik yang lebih detail untuk melihat kinerja dalam menjalankan proses, sementara IKU adalah metrik untuk melihat kinerja dalam mencapai hasil akhir yang lebih besar.

Tabel 4.2.
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET IKK TAHUN 2026
1	Sub Sektor Tanaman Pangan		
	- Padi	ton/thn	50.219,35
	- Jagung	ton/thn	17.065,68
	- Cabe	ton/thn	27,79
2	Sub Sektor Perkebunan		
	- Kelapa Sawit	ton/thn	409.928.41
	- Karet	ton/thn	639.15

	- Kelapa	ton/thn	673.96
	- Kopi	ton/thn	1.089.35
3	Sub Sektor Peternakan		
	- Sapi Potong	ton/thn	128,63
	- Kerbau	ton/thn	20,81
	- Kambing	ton/thn	8,61
	- Persentase Tingkat Pengendalian PHMS	Persen	100,00
	- Pra NKV	Unit	10,00
	- NKV	Unit	2,00
4	Kelembagaan Penyuluh dan Petani		
	Klasifikasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	Unit	10 Madya 0 Pratama
	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Persen	45%
	Rasio ketersediaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terhadap desa binaan	Orang/Desa	1 : 1,6
	Jumlah koperasi tani dan KEP yang terbentuk dan beroperasi	Unit	6
5	Sarana dan Prasarana Pertanian		
	Persentase Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian (Alsintan, Pupuk dan Pestisida) sesuai kebutuhan dan Peruntukan	Persen	77%
	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pertanian	Kali/thn	73%
	Indeks Pertanaman (IP) Padi	Persen	1,87
6	Sekretariat		
	Nilai AKIP	-	B

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dibawah ini tertera rincian rencana program/kegiatan/Sub Kegiatan serta pendanaan yang diperlukan dalam pencapaian target kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja terkait, sebagai berikut

4.1. Urusan Rutin

**Tabel 5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan
Program/Kegiatan Sekretariat Dinas Pertanian**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	17.020.000.000
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,000,000
1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130,000,000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.500.000.000
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.980.000.000
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500,000,000
2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000
2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semestaran SKPD	10,000,000
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20,000,000
3.1	Sub Kegiatan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20,000,000
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.000.000
4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	90,000,000
4.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000,000
4.3	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,000,000
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	350,000,000

5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000
5.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,000,000
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	650,000,000
6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500,000,000
6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000
6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,000,000
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,000,000
7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10,000,000
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170,000,000
8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,000,000
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000
	JUMLAH	17.020.000.000

4.2. Urusan Pilihan Pertanian

Tabel 5.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	340.000.000
1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	340.000.000
1.1	Sub Kegiatan Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	185.000.000
1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	20.000.000
1.3	Sub Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	135.000.000
II	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	60.000000
2	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	60.000.000
2.1	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	20.000.000
2.2	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan	20.000.000
2.3	Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	20.000.000
	JUMLAH	400.000.000

**Tabel 5.3. Rencana Kerja dan Pendanaan
Program/Kegiatan Bidang Perkebunan**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	80.000.000
1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	60.000.000
1.2	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	60.000.000
2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000
2.1	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	20.000.000
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.135.000.000
1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.135.000.000
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.000.000.000
1.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	135.000.000
	JUMLAH	1.215.000.000

**Tabel 5.4. Rencana Kerja dan Pendanaan
Program/Kegiatan Bidang Peternakan**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	345.000.000
1	Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	20.000.000
1.1	Sub Kegiatan Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	20.000.000
2	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	325.000.000
2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	25.000.000
2.2	Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	300.000.000
II	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	225.000.000
1	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
1.1	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
2	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
2.1	Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (HPM)	25.000.000
	JUMLAH	570.000.000

**Tabel 5.5. Rencana Kerja dan Pendanaan
Program/Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	50.000.000
1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	50.000.000
1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	50,000,000
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.522.413.100
2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	2.522.413.100
2.1	Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	220,000,000
2.2	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	220,000,000
2.3	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.192.413.100
2.4	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	220,000,000
2.6	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	120,000,000
2.7	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	150.000.000
2.8	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	50,000,000
2.9	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	200,000,000
3.0	Sub Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/ Produksi Ternak	100.000.000
3.1	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	50.000.000
III	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	60,000,000
3	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	60,000,000
3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	20.000.000
3.2	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangann Teknis Izin Usaha Pertanian	20.000.000
3.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	20.000.000
	JUMLAH	2,632,413,100

**Tabel 5.6. Rencana Kerja dan Pendanaan
Program/Kegiatan Bidang Penyuluhan**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
I	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	225.000.000
1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	225.000.000
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	75,000,000

1.2	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	30,000,000
1.3	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	50,000,000
1.4	Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	20,000,000
1.5	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	50,000,000
	JUMLAH	225.000.000

Tabel 5.7. Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan UPTD Puskesmas Kota Manna

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
I	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	105,000,000
1	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	105,000,000
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Puskesmas Sulau	105,000,000
	JUMLAH	105.00.0

Tabel 5.8. Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan UPTD Puskesmas Sulau

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
I	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	105,000,000
1	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	105,000,000
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Puskesmas Sulau	105,000,000
	JUMLAH	105.000.000

Tabel 5.9. Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	15,000,000
4	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	15,000,000
4.1	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	15,000,000
	JUMLAH	15.000.000

**Tabel 5.10. Rencana Kerja dan Pendanaan
Program/Kegiatan UPTD Balai Benih TPHP**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	15,000,000
3	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	15,000,000
3.1	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tumbuhan	15,000,000
	JUMLAH	15.000.000

Secara rinci **Matrik Rencana Kerja** yang memuat nama program/kegiatan, indikator kinerja, capaian target, dan kebutuhan dana/pagu indikatif tahun anggaran 2025 serta perkiraan anggaran maju tahun 2026 dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana terlampir.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026 disusun atas kebutuhan organisasi dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta kesepakatan atas musyawarah antar pelaku pembangunan pada tahapan forum SKPD sebagai kepatuhan terhadap regulasi, keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan lintas instansi

RENJA ini berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2026, serta menjadi kerangka acuan pencapaian sasaran dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dalam pelayanan publik, sehingga outcome kinerja organisasi dalam rangka **“Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Petani”**. akan dapat direalisasikan dengan baik.

Pencapaian tujuan organisasi, pada akhirnya diharapkan juga akan memberikan kontribusi bagi pencapaian sebagian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Manna, 8 Agustus 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



SAKIMIN, S.Pt
Nip. 19660307 199802 1001

LAMPIRAN



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 38 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2016, Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011, Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021, Nomor 03);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8;
16. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;
17. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan adanya perubahan maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada Tanggal : 8 Agustus 2025

KEPALA DINAS



SAKIMIN, S.Pt

Nip. 19660307 199802 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Bengkulu Selatan di Manna;
2. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna;
4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna.

CASCADING
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DALAM RENSTRA TAHUN 2026

No	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program (Dalam SIPD)			Kegiatan (Dalam SIPD)			Sub Kegiatan (Dalam SIPD)			Penanggung Jawab
					Nama Program	Outcome	Indikator	Nama Kegiatan	Output	Indikator	Nama Sub Kegiatan	Output	Indikator	
1	Meningkatnya Produktifitas dan Nilai Tambah Ekonomi Untuk Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Petani (NTUP)	Meningkatnya Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	NTUP	3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Tersedianya akses petani terhadap benih/bibit, alat mesin pertanian (alsintan), pupuk dan pestisida; 2. Kemudahan akses dalam pelayanan, pembiayaan dan investasi.	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan 4. Peningkatan Produksi Perkebunan	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terjaminnya mutu dan keamanan sarana pertanian (pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian) yang beredar, dan digunakan petani; 2. Terkendalinya penyimpanan dalam pengadaan, peredaran, dan penggunaan sarana pertanian.	1. Jumlah pengawasan; 2. Persentase Sarana Pertanian yang digunakan sesuai standar; 3. Jumlah UPJA yang Tumbuh dan Berkembang	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana PendukungPertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terlaksananya pengawasan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian	1. Jumlah Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (RDKK); 2. Frekwensi Monitoring dan pengawasan Kios Pengecer Pupuk bersubsidi; 3. Frekwensi pembinaan dan bimbingan pemanfaatan alsintan.	Bidang Sarana dan Prasarana
											3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya bimbingan pembiayaan pertanian, pemberian fasilitasi dan investasi pertanian	1. Jumlah realisasi AUDP dan AUTS; 2. Frekwensi pembinaan dan bimbingan akses pembiayaan dan investasi pertanian	Bidang Sarana dan Prasarana
											3.27.02.2.01.0005 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terlaksananya bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura	Frekwensi bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di kelompok tani/UPH	Bidang TPH
											3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Bidang TPH
								3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terjaminnya Kemurnian dan Kelestarian SDG	Persentase Cakupan Pemanfaatan SDG Tanaman	3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan, pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura	1. Jumlah luas lahan yang diberikan bantuan benih padi melalui kelompok tani; 2. Jumlah kelompok penangkaran benih padi binaan; 3.	Bidang TPH
											3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Terlaksananya kegiatan Balai Benih THPP	1. Jumlah Benih Padi Generasi F1 berkualitas untuk disebarluaskan; 2. Jumlah Layanan Data rekomendasi dan informasi perbenihan yang diberikan untuk pihak-pihak terkait.	UPTD Balai Benih THPP
								3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terpenuhinya kebutuhan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak berkualitas	1. Jumlah Benih/Bibit yang Disediakan; 2. Luas Lahan Hijauan Pakan Ternak.	3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya kegiatan penyediaan dan pengembangan hijauan pakan ternak	1. Jumlah Hijauan Pakan Ternak di Selai; 2. Frekwensi pembinaan Bank Pakan Ternak	Bidang Peternakan
											3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya pengelolaan sumber daya genetik hewan serta bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak	1. Jumlah bantuan bibit ternak untuk diberikan kepada masyarakat; 2. Frekwensi Pembinaan peternak daerah.	Bidang Peternakan
2					3.27.03. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Meningkatnya kapasitas sentra produksi pertanian unggul; 2. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur di kawasan sentra produksi pertanian	1. Persentase Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian (Alsintan, Pupuk dan Pestisida) sesuai kebutuhan dan Peruntukan; 2. Persentase ketersediaan Infrastruktur pertanian; 2. Indeks Pertanaman (IP)	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Terselenggaranya pembangunan perkebunan yang berkelanjutan	Jumlah laporan dan informasi yang terpadu untuk mendukung pengembangan perkebunan berkelanjutan	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi yang efektif terhadap berbagai upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perkebunan berdasarkan informasi yang akurat dan terpadu	Bidang Perkebunan
											3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Bidang Sarana dan Prasarana

											3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Bidang Sarana dan Prasarana	
								3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Infrastruktur pertanian yang memadai	Jumlah dan Jenis Infrastruktur pertanian yang tersedia dalam mendukung kelancaran program pembangunan pertanian	3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terlaksananya pembangunan, Rerehabilitasi dan Pemeliharaanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Sarana dan Prasarana	
											3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Pembangunan, Rerehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Sarana dan Prasarana	
											3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Sarana dan Prasarana	
											3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Sarana dan Prasarana	
											3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Sarana dan Prasarana	
											3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan PemeliharaanJaringan Irigasi Usaha Tani	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Sarana dan Prasarana	
											3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Sarana dan Prasarana	
											3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
3						3.27.04.Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Tengendalnya penyakit hewan menular strategis dan zoonosis; 2. Terjaminnya keamanan dan mutu produk hewan untuk konsumsi masyarakat (ASUH)	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular, persentase pelayanan kesehatan hewan, penjaminan higiene dan sanitasi produk hewan, dan penjaminan produk hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular, serta penegakan kembali aktivitas normal di suatu wilayah pasca-wabah dengan mencegah penyebaran lebih lanjut	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian penyakit dan penjaminan Kesehatan hewan, pengawasan obat hewan, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner	1. Jumlah dan jenis obat- obatan dan peralatan medis yang tersedia; 2. Frekwensi pemantauan dan pengawasan penyebaran penyakit ternak; 3. Frekwensi pelaporan ISHIKNAS;	Bidang Peternakan
									3.27.04.2.03. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Laporan pelayanan	3.27.04.2.03.00012. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Dukungan operasional Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1. Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 2. Jumlah dan Jenis obat dan peralatan medis yang tersedia;	UPTD Puskesmas
									3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terjaminnya keamanan produk hewan dari peternakan hingga ke konsumen untuk melindungi kesehatan masyarakat.	1. Jumlah pelayanan Rumah Potong Hewan; 2. Jumlah pengawasan peredaran produk hewan	3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya kegiatan di Rumah Potong Hewan	Jumlah pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong (ante-mortem dan post-mortem)	UPTD Rumah Potong Hewan
												3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Terlaksananya i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Pertanian masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan serta bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan	1. Jumlah unit usaha produk hewan yang teregister Pra NKV dan NKV; 2. Terpautnya harga pasar produk peternakan; 3. Frekwensi pembinaan kelompok usaha peternakan.	Bidang Peternakan
												3.27.04.2.04.0007 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan MasyarakatVeteriner, dan kesejahteraan hewan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Tenaga Teknis Peternakan yang memiliki sertifikat keahlian	Bidang Peternakan
												3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan unit usaha produk hewan	Frekwensi pengawasan peredaran produk hewan dimasyarakat	Bidang Peternakan

4					3.27.05. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terkendalinya bencana pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Alam Pertanian 2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terkelolanya lahan pertanian dan produksi komoditi pertanian dari dampak negatif bencana	1. Peta Potensi Rawan Bencana Alam dan Dampak Perubahan Iklim (DPI); 2. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terhadap Potensi dan dampak yang ditimbulkan bencana pertanian	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya upaya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	1. Jumlah luas area serangan OPT; 2. Jumlah Penanganan Laporan serangan OPT; 3. Jumlah Cadangan Pestisida; 4. Jumlah laporan dan Dokumentasi	Bidang TPH
											3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim(DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya upaya penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. jumlah luas lahan yang berhasil dikendalikan dan dipulihkan; 2. Nilai kerugian atas dampak bencana; 3. Jumlah laporan dan Dokumentasi	Bidang TPH
											3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terlaksananya upaya penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan dan hortikultura	1. Jumlah luas area terdampak bencana alam; 2. Nilai kerugian atas dampak bencana; 3. Jumlah laporan dan Dokumentasi	Bidang TPH
5					3.27.06. Perizinan Usaha Pertanian	1. Tersedianya prasyarat legalitas usaha dibidang pertanian; 2. Meningkatnya kepatuhan terhadap standar izin usaha dibidang pertanian	1. Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi sebelum izin usaha diterbitkan; 2. Tingkat pelanggaran terhadap standarisasi perizinan usaha dibidang pertanian	3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya prosedur penerbitan izin usaha dibidang pertanian	1. Jumlah dan jenis izin usaha yang didiberikan rekomendasi teknis; 2. Jumlah dan jenis usaha dibidang pertanian yang dibina dan diawasi.	3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Tersedianya Rekomendasi Teknis atas permohonan izin usaha dibidang pertanian	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha	Bidang Sarana dan Prasarana
											3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Bidang Sarana dan Prasarana
6					3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan petani serta kemampuan mengelola usaha tani secara mandiri, menguntungkan dan berkelanjutan.	1. Klasifikasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP); 2. Persentase kenaikan kelas kelompok tani 3. Rasio ketersediaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terhadap desa binaan; 4. Jumlah koperasi tani dan KEP yang terbentuk dan beroperasi	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh dan petani yang ditingkatkan; 2. Persentase kelembagaan koperasi petani yang dibentuk dan beroperasi;	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Tercapainya pelaksanaan program penyuluhan serta meningkatnya kinerja penyuluh	1. Frekuensi Rapat Penyuluh di BPP; 2. Jumlah Program BPP; 3. Jumlah Rencana Kerja Tahunan BPP	Bidang Penyuluhan
											3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya fungsi dan peran kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai wadah komunikasi yang efektif	Jumlah Kelembagaan Petani teregister dalam SIMLUHTAN	Bidang Penyuluhan
											3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha	Jumlah dan Jenis bahan penyuluhan yang tersedia;	Bidang Penyuluhan
											3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya produktivitas lahan dan tanaman melalui penerapan teknologi pertanian yang tepat dan spesifik lokasi	Jumlah dan Jenis Sekolah Lapang (SL) yang dilaksanakan	Bidang Penyuluhan
											3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap penyuluh pertanian	1. Jumlah Penyuluh ASN dan PPS yang tersedia; 2. Jumlah dan Jenis pelatihan yang diikuti penyuluh;	Bidang Penyuluhan
											3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Terbentuknya kelembagaan petani yang mandiri, kuat, dan berdaya saing, dengan kemampuan manajerial, kewirausahaan, serta posisi tawar yang lebih baik untuk dapat mengakses informasi, teknologi, modal, dan pasar	Jumlah koperasi tani /kelompok ekonomi produktif (KEP) yang terbentuk	Bidang Penyuluhan
											3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Meningkatnya pengetahuan, perubahan sikap, dan peningkatan keterampilan petani dalam memanfaatkan inovasi teknis, sosial, dan ekonomi	1. Jumlah dan jenis adopsi teknologi yang berhasil diterapkan petani; 2. Jumlah dan Jenis Inovasi yang dihasilkan dan memberikan manfaat usaha yang signifikan.	Bidang Penyuluhan